



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR :24/DP3APPKB/IV/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA NOMOR 03/DP3APPKB/I/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu Melakukan Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Nomor 03/DP3APPKB/I/2020 Tentang Pengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Nomor 03/DP3APPKB/I/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 17 April 2020



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 24/DP3APPKB/IV/2020
TANGGAL : 17 April 2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 03/DP3APPKB/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA / NIP	J A B A T A N	PROGRAM KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	A. ZULKIFLI NURDIN, SH NIP. 19710908 200604 1 006	Sekretaris	I. PROGRAM PEMENUHAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan layanan kebersihan kantor 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan bahan logistic kantor 6. Rapat – rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya 7. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 8. Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 14. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB II. PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja 3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan 4. Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	

No.	NAMA / NIP	J A B A T A N	PROGRAM KEGIATAN		KET.
			4	5	
1		3			
2.	NURLELY RAHMAN, S.Pi NIP. 19700301 199503 2 001	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	III. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER 1. Pembinaan Organisasi Perempuan 2. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 3. Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 4. Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan politik. 5. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 6. Workshop Penyusunan PPRG 7. Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 8. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 9. Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera		
3.	SAHERI L, S.Sos, M.Si 19621231 199003 2 041	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN PERLINDUNGAN ANAK 1. Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan anak 2. Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak 3. Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Pembangunan 4. Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. 5. Sosialisasi Pencegahan Anak dan Tindak Kekerasan 6. Sosialisasi Partisipasi ibu dalam Perlindungan Anak. 7. Pelatihan Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan 8. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan P2TP2A 9. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT 10. Pembinaan Lembaga dan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus 11. Penguatan Kota Layak Anak (KLA)		

No.	NAMA / NIP	J A B A T A N	PROGRAM KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
4.	A. MUTHIAH RAHIMAH ANWAR, SE 19791014 200801 2 015	Kepala Kepala Seksi Pwengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	V. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1. Sosialisasi Kajian Kebijakan Pengendalian Penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan 2. Pengolahan data dan Informasi Program KB 3. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP 4. Pemantapan Advokasi Kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Kegiatan KKBPK 5. Pelaksanaan Updating Keluarga Melalui Pendataan Keluarga	
5.	TAMRIN, SH 19641231 198603 1 225	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	VI. PROGRAM KB 1. Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-KES, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana 3. Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB) 4. Pembinaan Keluarga Berencana 5. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa VII. PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 1. Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKAS 2. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 3. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) 4. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 17 April 2020

